



## BAB I

### DAFTAR ISI

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah (Otda) yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang membawa perubahan paradigma baru di bidang Pemerintahan utamanya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pemerintah Daerah (Pemda) pada hakekatnya merupakan bagian dari sub sistem penyelenggraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang terintegasi secara Nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yang berlandaskan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk itu, pencapaian tujuan dan cita-cita Nasional Bangsa dan Negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi di setiap wilayah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tathun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan paradigma dan tuntutan pembangunan dari *sentralistik* menjadi *desentralistik* tersebut telah memberi infikasi terhadap sistem dari praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada khususnya di Daerah. Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



Dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan juga Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005.

Dari semua unsur tersebut yang tidak terpisahkan dari implementasi dan juga perwujudan dari pelaksanaan Refomasi Birokrasi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu, dokumen Rencana Perangkat Daerah yakni Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang didalamnya memuat tentang program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada setiap Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ini dilakukan di setiap Tahun Anggaran secara paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan partisipasi seluruh *stakeholder* yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga tingkat Nasional.

Hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut kemudian ditindak lanjuti dalam forum perangkat daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pada setiap perangkat daerah dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga (Renja K/L) terkait.



Hasil terakhir dari perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), selanjutnya akan ditindak lanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) disetiap Tahun anggaran.

Proses dan mekanisme dan perencanaan akan lebih bernuansa *bottom up planing*, karena secara langsung dengan perumusan semakin besar untuk terlibat secara langsung dengan perumusan dan aplikasi terhadap berbagai konsepsi perencanaan dan aktifitas pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah.

Kabupaten Bone yang kaya dan sangat potensial disektor pariwisata seperti obyek wisata alam, obyek wisata budaya dan obyek wisata sejarah serta indikator pendukung kepariwisataan seperti tersedianya akomodasi dan sarana wisata lainnya yang siap menyambut kunjungan wisatawan ke daerah ini, baik wisatawan lokal, wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, diperlukan adanya perencanaan secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu dituangkan dalam bentuk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam kurun waktu tertentu.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, didasarkan pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005 s/d Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;



19. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Kabupaten Bone Tahun 2018 s/d 2023.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategis serta kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020 guna mewujudkan Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone.

Adapun Visi dan Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone, adalah sebagai berikut :

- ❖ Visi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone:

***“MASAYARKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA  
SAING DAN SEJAHTERA”***

- ❖ Adapun penjelasan Visi Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

- **Masyarakat Bone Yang Mandiri** : Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;.
- **Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing** : Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, kompratif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.



- **Masyarakat Bone Yang Sejahtera** : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Bone tersebut, maka ditetapkan Misi Kabupaten Bone sebagai berikut:

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan kearifan budaya lokal.
- b. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, pemberdayaan pelaku ekonomi dan kelestarian lingkungan.
- c. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
- d. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
- e. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha.
- f. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
- g. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja dan pengembangan program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
- h. Memperkuat budaya politik dan hukum yang demokratis.
- i. Mengembangkan Inovasi Daerah dalam peningkatan Pelayanan Publik
- j. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone disusun dengan maksud mendeskripsikan program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2020. Deskripsi tersebut bertujuan untuk :



- a. Memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020.
- b. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang diusulkan sebagai program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.4 Analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunities - Threats*) Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) DINAS PARIWISATA KABUPATEN BONE**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

4.1 Program dan Kegiatan

**BAB V : PENUTUP**

5.1 Penutup





## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja dan sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun berikutnya.

Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)**

Kajian terhadap hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun ini (Tahun 2020) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun lalu (Tahun 2018) dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2019) yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja Tahun lalu (Tahun 2018) Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun berjalan (Tahun 2019).



Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2019, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah yang tertuang di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan dan perbaikan kinerja Perangkat Daerah kedepannya. Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2019 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2018 dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2019. Secara umum, hasil evaluasinya dapat dilihat pada Tabel 1 (*Tabel T-C. 29*) pada *halaman selanjutnya*.



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam hal unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan, yaitu “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Kabupaten Bone”. Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk 5 (lima) Tahun hanya mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dimana capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dinyatakan dalam 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kerjanya.

Keempat indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dengan tolak ukur kinerja sebagai berikut ini :

Tabel 2.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata  
Kabupaten Bone Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBERNYA
1	2	3	4
Meningkatnya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Jumlah Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang di kembangkan	Paket	Data Base Pariwisata
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Persen kunjungan wisatawan (wisman dan wisnus)	Persen (%)	Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018-2023



**Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**  
**Tahun 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBERNYA
1	2	3	4
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan	Persentase peningkatan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata (Pokdarwis) yang mandiri	Persen (%)	Surat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata	Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	Indeks	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

Hasil pengukuran pencapaian kinerja dan analisisnya berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone hingga Tahun 2019 (Triwulan I) untuk pencapaian target jangka menengah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018-2023 di *halaman selanjutnya* :





*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah yang diemban oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone ditetapkan tolak ukur melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada Tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran beserta indikator kinerja telah memenuhi target Tahunan dan target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang telah ditetapkan dan tersisa 1 indikator kinerja yang masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya yaitu *Indeks Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP* yang belum optimal dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone pada Tahun ini.

Oleh karena itu, kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil dari *Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Urusan Pariwisata*, perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Terkait dengan hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang berdampak pada kondisi tata kelola pemerintahan daerah khususnya dalam bidang kepariwisataan sebagaimana tersebut di atas, antara lain meliputi :

1. Perencanaan Program Kerja Bidang Kepariwisataan yang belum sepenuhnya berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang ada, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;



**Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**  
**Tahun 2020**

2. Penguatan peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) produk pariwisata yang masih harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata dan kinerja pelayanan publik, juga dalam rangka meminimalisir laporan pengaduan Petugas Obyek Wisata, laporan pengaduan wisatawan dan laporan pengaduan masyarakat;
3. Perencanaan dan penganggaran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip “*money follow program*”, dimana perencanaan kinerja program dan kegiatan masih perlu diarahkan agar berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Hal ini, diperlukan untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dalam pemenuhan anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
4. Dukungan dari *stakeholder eksternal* berupa komitmen jajaran pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dan Kerjasama dengan Instansi Vertikal seperti Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jurnalis/ Wartawan selaku perwakilan suara rakyat, menjadi faktor yang juga berpengaruh dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah pada periode Tahun 2018-2023.

Untuk itu penetapan isu strategis menjadi hal yang mutlak untuk di tentukan agar pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dapat terwujud. Adapun isu-isu strategis dalam lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) adalah sebagai berikut ini :

Tabel 4  
 Isu-Isu Startegis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi)  
 Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Bone

N O	TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI))	M A S A L A H	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pengembangan kepariwisataan	Belum optimalnya pengembangan usaha kepariwisataan di Kabupaten Bone	Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana



**Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**  
**Tahun 2020**

<b>N O</b>	<b>TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)</b>	<b>M A S A L A H</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan fasilitasi sumber daya SDA dan SDM	Masih terbatasnya pemanfaatan potensi daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Kurangnya minat mengembangkan usaha di bidang ke-pariwisataan
3	Pembinaan teknis dan pelayanan dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan dan penyediaan fasilitas, penyelenggaraan konvensi, insentif dan pameran promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya	Belum optimalnya penggunaan media elektronik (internet) sebagai sarana promosi pemasaran pariwisata terhadap pameran dan event pariwisata yang dapat diakses secara global	Pemahaman tentang penggunaan media informasi dan media teknologi (internet) yang masih terbatas

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) guna pencapaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 tentunya dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, antara lain :

- ❖ Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
- ❖ Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- ❖ Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitasi penunjang kegiatan pariwisata; dan
- ❖ Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah, memiliki peran penting dalam mengawal kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Bone baik secara langsung maupun tidak langsung.



Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata Kabupaten Bone dan penyelesaian tindak lanjut hasil peningkatan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata yang masih belum optimal beserta upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, mengingat hasil capaian kerjanya belum sepenuhnya dapat memberikan dampak dan manfaat yang signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone pada sektor pariwisata.

Hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bone yang baik dan bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional yang visi kedepannya menjadi Pemerintahan Tingkat Dunia.

#### **2.4. Analisis SWOT (*Strength – Weakness – Opportunities - Threats*) Dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) adalah suatu instrumen eksternal dan internal yang sudah banyak dipakai. Analisis ini fokus pada basis data perkembangan organisasi menggunakan pola 3-1-5. Arti dari pola tersebut adalah analisa dilakukan berdasarkan data perkembangan organisasi tiga tahun sebelum analisis, kemudian Tahun analisis dilakukan dan pasca analisis untuk perkembangan lima Tahun ke depan. Kegiatan analisis ini dilakukan agar strategi yang diambil organisasi bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta dan dasar yang kuat. Biasanya dalam analisis SWOT perusahaan cenderung akan membuat sebanyak mungkin daftar kekuatan sebagai upaya kompetisi.

Analisis SWOT terdiri dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Tantangan). Adapun penjelasan dari analisis SWOT adalah sebagai berikut ini :

1. *Strength* (Kekuatan) : Analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh organisasi. Misalnya saja menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki organisasi seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi



strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan organisasi;

2. *Weakness* (Kelemahan) : Analisis terhadap unsur kelemahan yang dimiliki organisasi. Untuk mengetahui kelemahan organisasi bisa dengan melakukan perbandingan dengan pesaing seperti apa yang dimiliki organisasi lain namun tidak dimiliki perusahaan Anda. Jika ingin membuat daftar kelemahan organisasi secara lebih obyektif bisa dengan testimoni konsumen yang umumnya lebih mengetahui apa yang kurang dari sebuah organisasi;
3. *Opportunities* (Peluang) : Analisis terhadap unsur peluang biasanya dibuat pada saat awal membangun sebuah organisasi. Ini karena organisasi dibentuk berdasarkan peluang atau kesempatan untuk menghasilkan keuntungan. Unsur peluang termasuk daftar apa saja yang memungkinkan organisasi mampu bertahan dan diterima di masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang; dan
4. *Threats* (Tantangan) : Analisis terhadap unsur ancaman sangat penting karena menentukan apakah organisasi dapat bertahan atau tidak di masa depan. Beberapa hal yang termasuk unsur ancaman misalnya banyaknya pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya. Membuat daftar ancaman perusahaan bisa untuk jangka pendek maupun jangka panjang serta bisa sewaktu-waktu bertambah atau berkurang.

Analisis terhadap lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dilakukan dengan pendekatan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities, Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

#### **a. Analisa Lingkungan Eksternal**

- 1) Peluang (*Opportunities*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - a) Dukungan kebijakan yang memberikan kewenangan yang besar dengan dasar hukum yang jelas kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan bidang kepariwisataan;



- 
- b) Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat berdampak pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih;
  
  - c) Meningkatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dalam mengakses berbagai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya yang terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam bidang pariwisata;
  - d) Terbukanya link dengan Luar Negeri sehingga mempermudah kunjungan wisatawan dari Luar Negeri untuk datang berkunjung ke Obyek Daya Tarik Wisata yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.
- 2) Tantangan (*Threats*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
- a) Tuntutan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya transparansi, akuntabilitas, dan penegakan supremasi hukum yang merupakan tantangan untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui program dan kegiatan di bidang kepariwisataan;
  - b) Dinamika Peraturan Perundang-Undangan dari pemerintah pusat dan daerah dalam konteks otonomi/kewenangan daerah yang terus mengalami perubahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan;
  - c) Tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas (*clean government and good governance*) dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - d) Kompleksitas dari segala aspek yang ada dan terus berkembang dengan dinamika beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, bila dibandingkan





dengan kuantitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), ketersediaan anggaran beserta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;

- e) Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone yang masih kurang untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Kabupaten Bone belum optimal dalam pencapaiannya;
- f) Tuntutan akan peningkatan kapabilitas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai yang dinilai oleh APIP untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi;
- g) Berkembangnya Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh regional Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lainnya di Indonesia sehingga dibutuhkan *support* yang besar dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.

#### **b. Analisa Lingkungan Internal**

1. Kekuatan (*Strengths*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :
  - a) Revitalisasi dan optimalisasi sektor pariwisata yang bermuara pada peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;
  - b) Dukungan dan komitmen penuh dari unsur pimpinan daerah (Bupati Bone dan Wakil Bupati Bone serta Sekda Kabupaten Bone) selaku pengambil kebijakan tertinggi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone;
  - c) Motivasi kerja yang tinggi dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone;



- d) Dukungan kerjasama dan sinergitas dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eksternal dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Internal lainnya, baik dari Kementerian Pariwisata maupun dari Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Kelemahan (*Weakness*) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone adalah sebagai berikut ini :

- a) Masih terbatasnya kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja, seperti permasalahan ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang belum memadai;
- b) Kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang masih rendah, khususnya yang terkait dengan manajemen sistem pengawasan program dan kegiatan serta penganggaran yang belum memadai sebagai akibat dari belum cukupnya dampak/manfaat secara signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan Daerah di Kabupaten Bone;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, khususnya ruangan gedung kantor, peralatan kerja (komputer), perlengkapan mebeurnya (meja dan kursi kerja), dan juga sarana operasional lapangan;
- d) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Dari kajian dan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat disimpulkan isu-isu penting yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2020, yaitu sebagai berikut ini :



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

- a. Hasil pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum sepenuhnya berdampak secara optimal untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, ditinjau dari :
  1. Tingkat capaian implementasi;
  2. Tingkat akuntabilitas kinerja;
  3. Tingkat akuntabilitas keuangan dan asset daerah;
  4. Tingkat maturitas SPIP;
  5. Langkah pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  6. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi maupun pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
  7. Tingkat pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  8. Tingkat kinerja pelayanan public dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
- b. Penanganan atas Laporan Petugas Obyek Wisata, Laporan Pengaduan Wisatawan dan Laporan Pengaduan Masyarakat meski telah beberapa kali mencapai target pada lima (5) Tahun sebelumnya, masih perlu langkah pengoptimalan dan pembenahan dari segi sistem dan dari segi mekanismenya agar aspek transparansi dan aspek akuntabilitas berdampak pada tingkat kepercayaan wisatawan dan masyarakat atas kinerja Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dapat meningkat terutama yang terkait dengan Obyek Daya Tarik Wisata, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dan pelayanan publik yang dilakukan oleh Petugas Obyek Wisata dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.
- c. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan masih perlu dioptimalkan khususnya dalam penanganan kasus yang terindikasi oleh Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), seperti; Pungutan Liar (Pungli), gratifikasi dan benturan kepentingan



- yang ada didalamnya serta pengembangan *Whistle Blowing System (WBS)* untuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Masih belum memadainya tingkat ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang kompeten dan profesional baik secara kuantitas maupun kualitasnya atas penyelenggaraan urusan kepariwisataan.

Keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone guna pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi sebagai bagian dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Pencapaian Visi Misi Bupati Bone periode Tahun 2018-2023, yaitu untuk mewujudkan “*Masyarakat Bone Yang Mandiri Berdaya Saing dan Sejahtera*”, banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek strategis berupa kekuatan dan kelemahan secara internal dan eksternal serta tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Lingkungan internal dan eksternal merupakan variabel yang mempengaruhi strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Lingkungan internal yang berpengaruh umumnya masih dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tetapi diluar kendali, sehingga dibutuhkan analisis untuk menciptakan strategi dalam mengatasi tantangan yang ada terkait isu-isu strategis yang menjadi fokus pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kedepannya.

## **2.5. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun (RKT) sebelumnya dan capaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan



hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD).

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/ kegiatan beserta *outcome/output*nya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/ kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (*outcome/output*) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (*outcome/output*) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 5 di halaman selanjutnya.



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---





*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



Dalam tabel tersebut di atas, terdapat penambahan program dan kegiatan baru dan penyesuaian yang dilakukan sebagai hasil analisis kebutuhan dan beberapa hal yang menjadi catatan penting.

Program dan kegiatan baru yang dimaksudkan sesuai dengan *Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone*, adalah sebagai berikut :

1. Program :

Penunjang Pemerintahan Umum.

2. Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah;
- b. Pengelolaan Website Perangkat Daerah;
- c. Promosi dan Pameran Pembangunan.

Program dan kegiatan di atas dikhususkan untuk mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam urusan pariwisata dan memperkenalkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang baru dan potensial ke masyarakat luas.

Penyesuaian yang dilakukan secara umum pada penetapan rumusan indikator kinerja *outcome* dan *output* dari program dan kegiatan yang dilakukan agar lebih berorientasi pada hasil dan memenuhi indikator kinerja yang baik (*SMART : Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound*) dengan target kinerja Tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan dengan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja Tahun sebelumnya hingga Tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan



penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Catatan penting yang disajikan terkait penjelasan sifat prioritas/strategisnya program dan kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang dirumuskan.

## **2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone merupakan perangkat daerah yang secara langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone.

Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta organisasi lainnya selaku *stakeholder eksternal* pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD). Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para *stakeholder eksternal* tersebut untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Namun demikian, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan.

Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kawasan obyek pariwisata dan Aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Bone menjadikan hal tersebut sebagai salah satu aspek dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan serta peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupaten Bone. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas



kewenangan dan penugasan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

### Bab iii

#### Tujuan, sasaran perangkat daerah

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, dan menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2020.

Terkait dengan peyelenggaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur dan mengelola Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang ada di Kabupatn Bone. Ada 2 (dua) Telaahan berdasarkan Rencana Starategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2018-2023, yakni sebagai berikut :



## **1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Dan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Terkait**

Dalam perencanaan strategis yang terkait permasalahan dan isu-isu strategis yang akan menjadi prioritas penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone lima (5) Tahun ke depan (2018-2023), telaahan dilakukan terhadap sasaran jangka menengah yang dimiliki oleh Kementerian Pariwisata dan Dinas Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan.

Lembaga-lembaga pemerintahan pusat dan daerah ini merupakan mitra kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang bersama-sama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama terkait dengan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*) khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Namun demikian, sebagaimana Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, lembaga-lembaga pemerintahan ini masing-masing memiliki batas kewenangan institusional yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor kunci yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran beserta konsistensi dan keselarasannya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, termasuk implementasi serta pengawasannya.

Hal-hal tersebut di atas, menjadi kondisi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ingin dicapai secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga daerah sebagai dampak dari hasil pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sesuai dengan Pembangunan kepariwisataan Nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :

1. Pembangunan destinasi pariwisata;
2. Pembangunan industri pariwisata;
3. Pembangunan pemasaran pariwisata; dan



#### 4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN);
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Sedangkan untuk Pembangunan Industri Pariwisata Nasional meliputi :

- a. Penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Dari 2 (dua) arah kebijakan dan strategis di atas dapat disimpulkan mengenai permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, adalah sebagai berikut:

Tabel  
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran





Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi  
Berserta Faktor Penghambat Dan Pendorong  
Keberhasilan Penanganannya

N O	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Linkage antar daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Terbatasnya sarana dan prasarana Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW)	Partisipasi dan promosi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh provinsi
2	Khususnya pada daerah tempat wisata. Memiliki produk pariwisata atau tradisi masyarakat yang bernilai tinggi yakni (landscape) alam yakni pegunungan dan bahari yang mempesona.	Daya tarik atau produk wisata yang belum di kemas dengan baik dalam paket kunjungan wisata.	Persepsi atau citra negatif destinasi wisata	Adanya promosi pariwisata baik skala lokal, skala nunsantara maupun skala manca-negara

N O	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Mewujudkan Upaya pengembangan ekonomi kreatif berbasis kebijakan lokal Provinsi Sulawesi Selatan	Belum optimalnya sosialisasi produk ekonomi kreatif di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	Persepsi tentang apresiasi produk ekonomi kreatif Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah.	Adanya promosi produk ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupatn Bone, Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tidak berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran-sasaran kinerja terkait aspek-aspek tersebut. Namun, proses pengawasan atas implementasinya tetap menjadi salah satu aspek pengawasan pada perangkat daerah yang terkait dengan hal tersebut.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone berkewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berimplikasi terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), agar berjalan sesuai Norma, Standar,



dan Prosedur Kerja (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan selaras dengan pencapaian target-target indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan (Tahun 2018-2023).

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bone merupakan bagian integral dari Pengembangan Kepariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone memiliki potensi obyek yang sangat beragam, baik kawasan wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan dalam pengembangannya merupakan bagian penting dari pembangunan pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone, diketahui kawasan pengembangan pariwisata mengarah pada:

1. Kawasan yang diperuntukan untuk wisata budaya di Kabupaten Bone, yang akan dikembangkan meliputi obyek wisata budaya, sebagai berikut:
  - a. Kawasan Museum Arajange, kawasan Manurunge di Matajang, kawasan Bola Soba, kawasan Tana Bangkalae, kawasan Kompleks Makam Kalokkoe, kawasan Bubung Tello, kawasan Masjid Raya Watampone, dan kawasan Komplek Mesjid Tua Lalebata di Kecamatan Tanete Riattang;
  - b. Kawasan Museum Lapawawoi, kawasan Makam Laummasa, kawasan Kuburan Petta Bettae, kawasan Sungai Jeppe'E, dan kawasan Bubung ParaniE di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - c. Kawasan Manurunge Ri Toro, dan kawasan Perkampungan Suku Bajo di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - d. Kawasan Kompleks Makam Petta PonggawaE dan kawasan Bubung Assengireng di Kecamatan Awangpone;
  - e. Kawasan Rakkala Manurung, kawasan Makam Laulio Bote'E, kawasan Petta Makkarama, kawasan Permainan Rakyat Sijuju' Solo' di Kecamatan Tellu Siattinge;



- f. Kawasan Makam Lapatau Matannatikka di Kecamatan Cenrana;
  - g. Kawasan Tugu Malamungpatu, kawasan Kerajinan Perak dan Kuningan, dan kawasan Pembuatan Baju Bodo di Kecamatan Ajangale;
  - h. Kawasan makam Raja-Raja Watang Lamuru, kawasan Serewara, dan Kawasan Mangngiri di Kecamatan Lamuru;
  - i. Kawasan Makam Datu Salomekko di Kecamatan Salomekko;
  - j. Kawasan Kerajinan Tangan Anemmi di Kecamatan Barebbo; dan
  - k. Kawasan Ajjongang di Kecamatan Patimpeng.
2. Kawasan yang diperuntukan untuk pariwisata alam terutama terkait dengan pengembangan potensi keindahan alam pegunungan dan pantai sebagai berikut :

- a. Kawasan Tanjung Palette dan kawasan Dermaga BajoE di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- b. Kawasan Gua Jepang di Kecamatan Barebbo;
- c. Kawasan Goa Janci di Kecamatan Awangpone;
- d. Kawasan Pantai Ujung Pattiro, di Kecamatan Sibulue;
- e. Kawasan Permandian Alam Lanca, kawasan Mattanempunga, kawasan Lagole dan kawasan Permandian Alam Otting di Kecamatan Tellu Siattinge;
- f. Kawasan Gua Mampu di Kecamatan Dua Boccoe;
- g. Kawasan Sumpang Labbu, kawasan Air Terjun Baruttung, dan kawasan Permandian alam Alinge di Kecamatan Ulaweng;
- h. Kawasan Permandian Alam Taretta di Kecamatan Amali;
- i. Kawasan Goa Lagaroang di Kecamatan Bengo;
- j. Kawasan Air Terjun Ladenring di Kecamatan Lamuru;
- k. Kawasan Goa Bola Batu di Kecamatan Mare;
- l. Kawasan Pantai Bone Lampe, dan kawasan Pasir Putih Gareccing di Kecamatan Tonra;
- m. Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng dan kawasan Permandian Waetuwo di Kecamatan Kajuara;
- n. Kawasan Bendungan Sanrego di Kecamatan Kahu;

- o. Kawasan Air Terjun Ulu Ere di Kecamatan Bontocani;
  - p. Kawasan Mata Air Panassaweng di Kecamatan Ponre;
  - q. Kawasan Uttang Menroja di Kecamatan Tanete Riattang Barat;
  - r. Kawasan Bendungan Salomekko di Kecamatan Salmekko; dan
  - s. Kawasan Permandian Alam Duppamatae di Kecamatan Palakka.
3. Kawasan pengembangan pariwisata buatan, terdiri dari kawasan Wisata Water Boom dan wisata Kuliner, yang akan dikembangkan di Kabupaten Bone, terdiri atas:
- a. Kawasan Wisata Water Boom Tanjung Palatte di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
  - b. Kawasan Wisata Kuliner Pusat Jajan Watampone di Kecamatan Tanete Riatang Barat;
  - c. Kawasan Wisata Kuliner Pantai Kering di Kecamatan Tanete Riattang.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk periode Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel  
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  
pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Untuk Periode Tahun 2018-2023

N O	KODE INDKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET RPJMD TAHUN 2018-2023	TARGET RPJPD	SKENARIO
1	2	3	4	5	6
1	8.9.1.(a)	Jumlah kunjungan Wi- satawan Mancanegara (Wisman)	1157,38	3396,13	Tanpa Upaya Tamba- han Target Tercapai
2	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan Wi- satawan Nusantara (Wisnus)	250.000	300.000	Jumlah kunjungan Wisatawan nusantara meningkat sulit dica- pai pada tahun 2019 sampai Tahun 2030, dikarenakan kecende- rungannya menurun sehingga diperlukan upaya tambahan.



### **3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**

Visi dan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2020 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rencana teknokratis) dalam masa transisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dari periode 5 (lima) Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju periode 5 (lima) Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, yaitu :

***MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA  
SAING, DAN SEJAHTERA***

Adapun penjelasan Visi Kabupaten Bone tersebut, yaitu:

- Masyarakat Bone Yang Mandiri : Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan utamanya dalam sektor pariwisata;
- Masyarakat Bone Yang Berdaya Saing : Mengandung makna tentang terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional terutama dalam bidang pariwisata.
- Masyarakat Bone Yang Sejahtera : mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana

kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya dalam bidang kepariwisataan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 tersebut, maka ditetapkan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya;

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan;
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik; dan

6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, dengan penjelasan dan keterkaitan dengan pokok visi, yaitu pada tabel berikut ini :

Tabel  
Keterkaitan Antara Rumusan Misi Kabupaten Bone  
Dengan Pokok Visi Kabupeten Bone

N O	MISI	PENJELASAN MISI	POKOK VISI
1	2	3	4
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri

2	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/ Sejahtera
3	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan; kesehatan; dan sosial dasar, serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan mengembangkan infrastruktur dasar.	Mandiri
5	Mendorong penciptaan iklim investtasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Meningkatkan arus investasi dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum,dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Visi dan Misi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bone tersebut di atas kemudian diangkat menjadi tema pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 yang telah diselaraskan dengan Tema RKP Nasional dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi, yaitu :

**MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG  
MANDIRI DAN BERDAYA SAING**

Ada 2 (dua) Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- ❖ Meningkatkan Budaya Politik, Penegakan Hukum, Dan Seni Budaya Dalam Kemajemukan Masyarakat.



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

---

Sesuai Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk Tahun 2020.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone untuk Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :





*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

---

- **Tujuan I :**  
Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata  
**Sasaran :**  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata
- **Tujuan II :**  
Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).  
**Sasaran :**  
Meningkatnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
- **Tujuan III :**  
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)  
**Sasaran :**  
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).
- **Tujuan IV :**



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

---

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.

**Sasaran :**

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.

Indikator kinerja (dampak) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada Tahun 2020, termasuk rencana program dan kegiatan terkait dapat dilihat pada tabel di halaman berikutnya :



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---





*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



#### **4.1. Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Periode Tahun 2018-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD), ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/ sasaran strategis setiap Tahunnya.

Disamping untuk mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam perencanaan kinerja Tahun 2020, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, dan



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bone, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) disetiap Kecamatan. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.

Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020, direncanakan terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, yang terbagi atas 3 (tiga) Program Prioritas dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 6 (enam) Program Pendukung dengan 19 (sembilan belas) Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah,

Ada 3 (tiga) program Prioritas dengan 13 (tiga belas) kegiatan prioritas yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

❖ **Program Prioritas I :**

Program pengembangan destinasi pariwisata.

❖ **Kegiatan Prioritas I :**

- Kegiatan pengembangan Objek Pariwisata Unggulan;
- Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;
- Kegiatan pengembangan Daerah Tujuan Wisata;
- Kegiatan pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi;
- Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Permandian Waetuo Kecamatan Kajuara;
- Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Tanjung Pallete Kecamatan Tanete Riattang Timur;



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

- Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Permandian Goa Cempalagi;
- Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pantai Angku'E; dan
- Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata Goa Mampu.

❖ **Program Prioritas II :**

Program pengembangan pemasaran pariwisata.

❖ **Kegiatan Prioritas II :**

- Kegiatan analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata; dan
- Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata Nusantara di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

❖ **Program Prioritas III :**

Program pengembangan kemitraan

❖ **Kegiatan Prioritas III :**

- Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan data base;
- Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan profesionalisme bidang pariwisata;
- Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kemitraan pariwisata.

Dari uraian program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 di atas mempunyai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang ingin dicapai, yakni :

❖ **Tujuan Program dan Kegiatan Prioritas :**

- Meningkatkan sarana dan prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW); dan
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.

❖ **Sasaran Program dan Kegiatan Prioritas :**

- Meningkatnya Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);



- Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW); dan
- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan.

❖ **Strategis Program dan Kegiatan Prioritas :**

- Meningkatkan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) melalui perbaikan infrastruktur dan membuka Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) baru melalui kerjasama dengan pihak lain;
- Mengembangkan promosi pariwisata yang terintegasi dalam program-program yang sementara melalui peningkatan kapasitas Aparatur dalam promosi pengembangan modal promosi pariwisata berbasis masyarakat; dan
- Meningkatnya kesadaran masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat serta memberdayakan masyarakat di Daerah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW).

❖ **Arah Kebijakan Program dan Kegiatan Prioritas :**

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
- Mewujudkan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang makin dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- Mewujudkan keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan.

Sementara itu, ada 6 (enam) program Pendukung dengan 19 (sembilan belas) kegiatan pendukung yang diarahkan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

❖ **Program Pendukung I :**

Program pelayanan administrasi perkantoran.

❖ **Kegiatan Pendukung I :**

- Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air (SDA) dan Listrik;



**Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD - PD)**  
**Dinas Pariwisata Kabupaten Bone**  
**Tahun 2020**

- Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
- Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah; dan
- Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran.

❖ **Program Pendukung II :**

Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

❖ **Kegiatan Pendukung II :**

- Kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional;
- Kegiatan pengadaan perlengkapan Gedung Kantor;
- Kegiatan pengadaan peralatan Gedung Kantor;
- Kegiatan Mebeleur;
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor;
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala Mebelur;
- Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor.

❖ **Program Pendukung III :**

Program peningkatan disiplin Aparatur.

❖ **Kegiatan Pendukung III :**

- Kegiatan pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
- Kegiatan pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
- Kegiatan pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu.

❖ **Program Pendukung IV :**

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA).

❖ **Kegiatan Pendukung IV :**

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

❖ **Program Pendukung V :**

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

❖ **Kegiatan Pendukung V :**





- Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

❖ **Program Pendukung VI :**

Program penunjang pemerintahan umum

❖ **Kegiatan Pendukung VI :**

- Kegiatan penyusunan Rencana Perangkat Daerah (RPD);
- Kegiatan pengelolaan Website Perangkat Daerah;
- Kegiatan Promosi dan Pameran Pembangunan.

Dari uraian program dan kegiatan pendukung sebagai program dan kegiatan rutin (generik) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 di atas mempunyai tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang ingin dicapai, yakni :

❖ **Tujuan Program dan Kegiatan Pendukung :**

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan pariwisata.

❖ **Sasaran Program dan Kegiatan Pendukung :**

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata.

❖ **Strategis Program dan Kegiatan Pendukung :**

- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan layanan Aparatur dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel.

❖ **Arah Kebijakan Program dan Kegiatan Pendukung :**

- Terpenuhi tata kelola pelayanan jasa kepariwisataan.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2020, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan *outcome*, *output*, dan *input* masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan.

Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

---

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target *outcome/output* program dan kegiatan, rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7 (*Terlampir dihalaman selanjutnya*)



#### 4.2. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata

Kabupaten Bone

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam rentang periode 5 (lima) Tahun (Recana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)) berjalan, yaitu Tahun 2018-2023, setiap Tahunnya telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel  
Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2018-2023 dan Proyeksi Tahun 2020

T A H U N	PAGU ANGGARAN			PRESENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
1	2	3	4	5
2018	Rp. 2.480.147.671.-	Rp. 4.997.170.000.-	Rp. 7.477.317.671.-	100 %
2019	Rp. 3.245.897.341.-	Rp. 5.217.763.750.-	Rp. 8.463.661.091.-	100 %
2020	Rp. -	Rp. 18.279.422.800.-	Rp. -	0,0 %
2021	Rp. -	Rp. 19.245.270.000.-	Rp. -	0,0 %
2022	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,0 %
2023	Rp. -	Rp. -	Rp. -	0,0 %

**Catatan :** Pagu anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 merupakan proyeksi dengan asumsi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---





*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---



## BAB V

### PENUTUP

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)  
Dinas Pariwisata Kabupaten Bone  
Tahun 2020*

kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) Tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan orientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Bone pada bidang kepariwisataan, termasuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang sudah terbentuk di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.

Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola destinasi pariwisata yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja urusan pariwisata dan sarana prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata beserta peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang baik dan bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 memuat terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan dengan Jumlah Dana (Pagu Indikatif) sebesar Rp. 18.279.422.800,- dan hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas terdiri dari 9 (sembilan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, yang terbagi atas 3 (tiga) Program Prioritas dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 6 (enam) Program Pendukung dengan 19 (sembilan belas) Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator dari 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone.



Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Dinas Pariwisata Kabupaten Bone dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) ke depan, yaitu sebagai berikut :

- ❖ Terbatasnya pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
- ❖ Belum optimal peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
- ❖ Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan prasarana serta fasilitasi penunjang kegiatan pariwisata; dan
- ❖ Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bone.

Dalam proses pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu ditindaklanjuti proses pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja *outcome/output* dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW).
2. Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) baru.
3. Mendorong Aparatur untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengemabangkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung pariwisata.
5. Mendorong keberdayaan masyarakat sebagai bagian dari penerima manfaat dalam pembangunan kepariwisataan.
6. Mewujudkan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yang makin dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Mewujudkan Aparatur yang peduli dengan perekonomian kreatif.
8. Intensitas koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di tingkatkan sehubungan dengan usaha pariwisata.

Kedepannya, diharapkan agar peningkatan alokasi anggaran untuk Penguatan Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bone sesuai dengan pagu indikatif yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020, dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga idealnya dapat mencapai nilai minimal 0,5%



*Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD)*  
*Dinas Pariwisata Kabupaten Bone*  
*Tahun 2020*

---

dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone pada Tahun 2020 nanti.

Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Tupoksi-PD) Dinas Pariwisata Kabupaten Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada Tahun 2020, yaitu, *"Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing"* sehingga tercipta, *"Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera"*.

Watampone,     Maret 2019

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
 KABUPATEN BONE,**

**A. IKHWAN BURHANUDDIN,SH.,M.Si.**

Pangkat : Pembina UtamaMuda

NIP. : 19640324 199210 1 002